

## PERANAN KREDIT DALAM MENDORONG KINERJA USAHA KECIL

Bayu Nuswantara  
Universitas Kristen Setya Wacana Salatiga  
Email: bnuswan@gmail.com

### Abstract

The objectives of the research were, (1) to analyze the influence of credits on small enterprises performance, and (2) to formulate the policies for development of credits that can promote the performance of small enterprises. This research used an econometric analysis in the form of simultaneous equation towards models of small enterprises economic consists of eight behavioral equations and three identity relationships. Estimation for structural equation parameters used the method of Two Stage Least Squares (2SLS).

The research conclusions are as follows: (1) the credits have an influence on the enterprise revenue, which is the main performance indicator of small enterprises, (2) the credits taken by these small enterprises will increase with the reduced interest rates, which in turn will increase the enterprise capital, the use of raw materials, fuel and labor, and finally increase the enterprise revenue, and (3) the policy-making on increasing of credits will provide the greatest impact of the increase in a row on: capital, raw material usage, enterprise income, and enterprise revenue. While the combination of policy-making on increasing of credits, increasing of price, and expansion of marketing areas to reach East Java, West Java, Jakarta and surrounding areas together, will provide the greatest increase in a row on: capital, enterprise income, enterprise revenue, and use of raw materials.

Keywords: Credits, small enterprise, enterprise performance, econometric model.

### 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan tahun keuangan mikro (international microfinance year 2005), dimana lembaga keuangan mikro juga telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi, antara lain bertujuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan dengan cara menciptakan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok yang rentan, mengurangi ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap risiko gagal panen, dan diversifikasi kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan (Arsyad, 2008). Dalam kaitan ini maka peranan kredit terhadap perekonomian menjadi penting, khususnya pada aspek mikro usaha kecil.

Perkembangan ini sejalan dengan perekonomian Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari adanya peran sektor usaha mikro dan kecil. Adapun peranan strategis dapat dilihat dari berbagai aspek (Bank Indonesia, 2005), yaitu:

1. Jumlah unit usahanya banyak dan terdapat hampir di setiap sektor ekonomi.
2. Potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. Kontribusi usaha mikro dan kecil dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar, serta potensinya dalam nilai ekspor non migas.

Data Kemenkop dan UKM tahun 2009, mencatat 52 723 470 unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau 99 persen lebih dari total pelaku usaha yaitu UMK dan Usaha Besar (UB), tersebar di sembilan sektor ekonomi, dengan urutan sektor: (1) pertanian 50.49 persen, (2) perdagangan 28.98 persen, dan (3) industri pengolahan 6.15 persen.

**Tabel 1.** Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar di Indonesia Tahun 2007-2009

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2007	2008	2009
I	Total Unit Usaha	Unit	50 150 263	51 414 262	52 769 280
1	Usaha Mikro	Unit	49 608 953	50 847 771	52 176 795
2	Usaha Kecil	Unit	498 565	522 124	546 675
3	Usaha Menengah	Unit	38 282	39 717	41 133
4	Usaha Besar	Unit	4 463	4 650	4 677
II	Total Tenaga Kerja	Orang	93 027 341	96 780 483	98 886 003
1	Usaha Mikro	Orang	84 452 002	87 810 366	90 012 694
2	Usaha Kecil	Orang	3 278 793	3 519 843	3 521 073
3	Usaha Menengah	Orang	2 761 135	2 694 069	2 677 565
4	Usaha Besar	Orang	2 535 411	2 756 205	2 674 671
III	Total PDB <sup>1)</sup>	Rp.Miliar	1 883 549.0	1 997 937.9	2 088 292.3
1	Usaha Mikro	Rp.Miliar	620 864.0	655 703.8	682 462.4
2	Usaha Kecil	Rp.Miliar	204 395.4	217 130.2	225 478.3
3	Usaha Menengah	Rp.Miliar	275 411.4	292 919.1	306 784.6
4	Usaha Besar	Rp.Miliar	782 878.2	832 184.8	873 567.0
IV	Total Ekspor Non Migas	Rp.Miliar	794 872.1	983 540.4	953 089.9
1	Usaha Mikro	Rp.Miliar	12 917.5	16 464.8	14 375.3
2	Usaha Kecil	Rp.Miliar	31 619.5	40 062.5	36 839.7
3	Usaha Menengah	Rp.Miliar	95 826.8	121 481.0	111 039.6
4	Usaha Besar	Rp.Miliar	654 508.3	805 532.1	790 835.3

**Sumber** : Kemenkop dan UKM, 2009 (diolah)

**Keterangan** : <sup>1)</sup> Total PDB Harga Konstan 2000

Besarnya potensi usaha mikro dan kecil, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah unit usaha mikro selama kurun waktu tahun 2007–2009 rata-rata sebesar 2.59 persen per tahun, sedangkan jumlah unit usaha kecil meningkat rata-rata 4.82 persen per tahun. Pada tahun 2009 tercatat jumlah usaha mikro sebanyak 52 176 795 unit atau mencapai 98.88 persen dari total jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sedangkan jumlah usaha kecil tercatat sebanyak 546 675 unit atau sekitar 1.04 persen.

Secara spesifik pula sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, antara lain banyak yang belum berbadan hukum dan merupakan usaha perorangan yang tidak memiliki laporan keuangan yang terpisah antara usaha dan pemiliknya. Manajemen usahanya merupakan usaha keluarga yang dikelola secara turun temurun (Bank Indonesia, 2005). Kondisi lainnya adalah pasar usaha mikro dan kecil yang digarap oleh perbankan baru sekitar 30 persen saja secara nasional, dan 70 persen sisanya, belum tergarap oleh perbankan nasional (Abdullah, 2006).

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang sangat potensial bagi upaya pengembangan usaha mikro dan kecil, serta diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi wilayah. Bank Indonesia (BI) Semarang (2008) menyatakan besarnya jumlah dan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta tingginya penyaluran kredit yang diberikan oleh perbankan, membuat Jawa Tengah mendapat sebutan *heart of small medium enterprises*.

Sementara itu hasil survei database terhadap pelaku UMKM (Bank Indonesia Semarang, 2008), menunjukkan: (1) aspek keuangan, sekitar 61 persen sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri, dan hanya sekitar 39 persen yang berasal dari modal pinjaman. Suku bunga pinjaman paling murah 0.12 persen per bulan dan paling mahal 3 persen per bulan. Sebagian besar sekitar 44 persen agunan berupa tanah dan bangunan, (2) aspek hukum dan manajemen, sekitar 45.71 persen pelaku usaha hanya memiliki satu macam perijinan, dalam arti belum semuanya perijinan dimiliki. Berkaitan dengan pengalaman berwirausaha, sekitar 61.90 persen pelaku usaha telah memiliki pengalaman bekerja sebelumnya sebagai wirausaha dalam jenis usaha yang lain maupun sebagai karyawan. Sebagian besar atau sekitar 48.6 persen pemilik usaha berpendidikan SMA/SMK atau yang setara, dan (3) aspek produksi dan pasar, terdapat 56.52 persen usaha beroperasi sebanding atau lebih besar dari kapasitas produksi. Sistem pembayaran bahan baku yang dilakukan 76.81 persen adalah tunai. Wilayah pemasaran produk sekitar 70.84 persen di wilayah Jawa Tengah, sekitar 27 persen di luar wilayah Jawa Tengah, dan untuk pemasaran ke luar negeri hanya 2.52 persen yang mampu mengaksesnya. Sistem pembayaran penjualan 63.81 persen adalah tunai.

Beberapa fakta yang patut dicatat: (1) kontribusi perbankan dalam menggarap pasar usaha mikro dan kecil secara nasional, baru mencapai angka sekitar 30 persen ini mengindikasikan adanya kesulitan usaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit atau adanya kesenjangan antara pengetahuan UMKM dengan produk dan prosedur perkreditan perbankan, (2) kontribusi usaha mikro dan kecil dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah sangatlah besar, dan (3) kemampuan daya tahan usaha mikro dan kecil selama pasca krisis ekonomi menunjukkan bahwa usaha mikro khususnya, sangatlah feasible secara bisnis tetapi belum bankable dalam mengakses kredit. Secara spesifik dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan kredit mikro dan kecil terhadap kinerja usaha kecil?
2. Sejauh mana kebijakan pengembangan kredit mikro dan kecil dalam mendorong kinerja usaha kecil?

## **2. TINJAUAN TEORI DAN PEMBENTUKAN HIOTESIS**

### **2.1. Kredit dan Usaha Kecil**

Di beberapa literatur disebutkan istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credo* atau *credere*, yang berarti kepercayaan atau trust. Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa di masa datang akan mampu memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan (Rivai dan Veithzal, 2007).

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan dan konsumsi, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat (Firdaus, 2004). Fungsi-fungsi kredit secara spesifik meliputi: (1) mendorong tukar menukar barang dan jasa, (2) mengaktifkan alat pembayaran yang idle, (3) menciptakan alat pembayaran baru, (4) sebagai alat pengendalian harga, dan (5) meningkatkan kegunaan (*utility*) potensi-potensi ekonomi yang ada.

Istilah kredit mikro (*microcredit*) erat kaitannya dengan kredit bagi usaha skala mikro dan kecil. Kredit mikro ini merupakan kredit dengan plafon pinjaman kurang dari Rp.50 juta dan terdiri dari kredit modal kerja, kredit

investasi dan kredit konsumsi (Bank Indonesia, 2006). Kredit mikro menjadi populer karena “metode kontroversial” dikembangkan di negara miskin, karena bank komersial sulit untuk memenuhi permintaan kredit dari rakyat yang tidak memiliki agunan fisik (physical collateral) tetapi layak mendapat kredit (creditworthy) (Hollis dan Sweetman, 1998).

Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak terkait dengan secara kepemilikan dengan usaha menengah atau usaha besar (UU No.20 Th 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dalam analisis teori mikroekonomi, usaha kecil sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan usaha melalui proses produksi dengan mengubah masukan (input) yang disebut juga faktor produksi termasuk segala sesuatu yang harus digunakannya, menjadi keluaran yang sering disebut produk (output) (Pindyck dan Rubinfeld, 2001).

Berkaitan dengan pemberlakuan UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka batasan usaha di definisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta sampai Rp 2.5 miliar.

Sedangkan batasan dan kriteria usaha kecil dari aspek penggunaan tenaga kerja, dapat dibedakan berdasarkan kriteria dari:

1. Bank Dunia: usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 10 orang, usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan tenaga kerja antara 10 sampai dengan 49 orang.
2. Badan Pusat Statistik: usaha mikro adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Usaha menengah adalah bila memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang.

## 2.2. Usaha Kecil dan Kebutuhan Kredit

Dalam kegiatan produksi, kredit sangat berperan sebagai penambah modal dari luar (eksternal) untuk membiayai masukan produksi sehingga produsen dapat meningkatkan produksi menjadi lebih tinggi. Masukan produksi yang dibiayai kredit mempunyai biaya tambahan yang nilainya sebesar tingkat bunga kredit. Adanya kredit akan menambah biaya untuk kegiatan produksi, sehingga dapat mempengaruhi komposisi penggunaan input optimum pada jalur perluasan usaha (expansion path).

Dengan pendekatan konsep biaya produksi, produsen akan menghadapi fungsi produksi sebagai berikut (Baker, 1968).

$$y = f(x_1, x_2 | x_f) \dots\dots\dots (01)$$

dimana:

- y = keluaran; dan f menyatakan fungsi daripada
- $x_1$  = masukan variabel
- $x_f$  = masukan lainnya yang dianggap tetap

Berdasarkan fungsi produksi tersebut, persamaan biaya dapat dinyatakan:

$$c = p_1x_1 + p_2x_2 + b \dots\dots\dots (02)$$

dimana:

c = biaya total yang dikeluarkan

$p_1$  = harga per satuan masukan variabel  $x_1$

b = total biaya tetap

Apabila saat ini biaya total c diketahui sejumlah modal tertentu, misalnya sebesar  $c_0$ , maka persamaan biaya menjadi:

$$c_0 = p_1x_1 + p_2x_2 + b \dots\dots\dots (03)$$

Berdasarkan persamaan biaya diatas, maka dapat diperoleh persamaan garis iso-biaya, yang menggambarkan permintaan masukan variabel  $x_1$  dan  $x_2$  pada jumlah modal  $c_0$  tersebut. Persamaan iso-biaya tersebut adalah:

$$x_1 = \frac{c_0 - b}{p_1} - \frac{p_2}{p_1} x_2 \dots\dots\dots (04)$$

$$x_2 = \frac{c_0 - b}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1 \dots\dots\dots (05)$$

Berdasarkan hubungan  $x_1$  dan  $x_2$  pada sejumlah biaya  $c_0$ , produsen dapat memaksimalkan keluaran y pada kondisi:

$$-\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{p_1}{p_2} \dots\dots\dots (06)$$

dimana  $-\frac{dx_2}{dx_1}$  menunjukkan daya substitusi masukan  $x_1$  terhadap masukan  $x_2$  dan juga merupakan sudut kemiringan garis iso-biaya, yaitu merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi penggunaan masukan  $x_1$  dan  $x_2$  yang dapat dilakukan dalam batas anggaran yang dimiliki, untuk produksi tertentu (Kuntjoro, 1983). Apabila  $c_0$  meningkat jumlahnya, maka akan diperoleh garis perluasan usaha (expansion path).

Dalam melakukan kegiatan produksi pelaku usaha masih terkendala oleh modal yang dimilikinya, sehingga penggunaan masukan  $x_1$  dan  $x_2$  juga terbatas jumlahnya. Dengan asumsi bahwa pelaku usaha kecil masih dalam tahap daerah produksi II yang rasional, yaitu produk marjinal masih positif sehingga masih dapat memperbanyak penggunaan masukan untuk menaikkan produksi, maka tambahan modal dari luar (eksternal) dapat diperoleh melalui kredit.

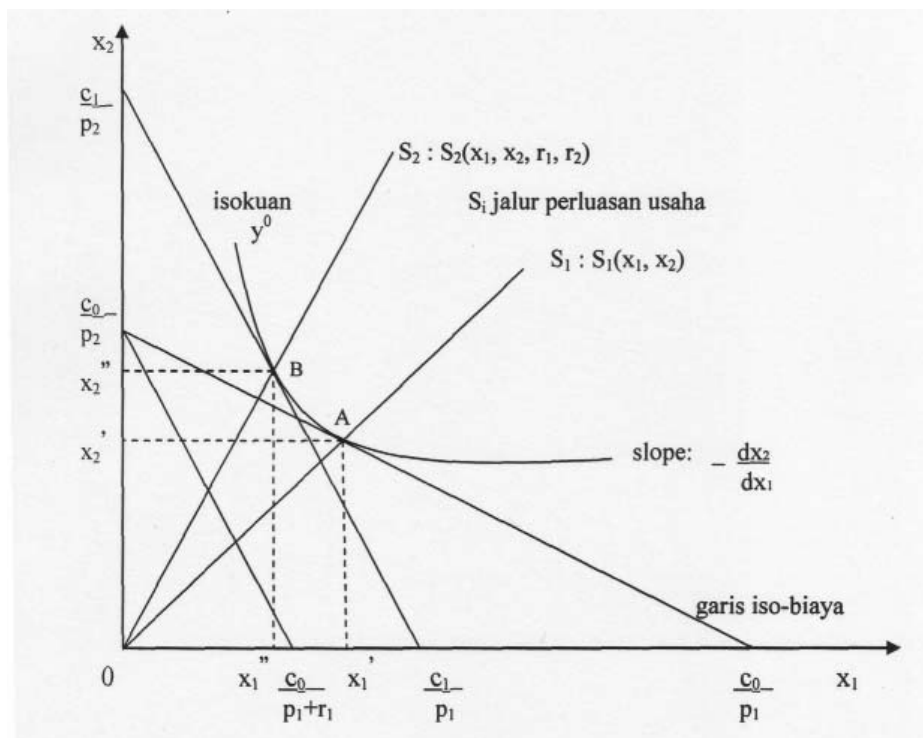
Persamaan produksi diatas masih menggunakan masukan produksi yang tidak dibiayai dengan kredit, sehingga harga masukan yang digunakan adalah harga pasar. Jika masukan  $x_1$  dan  $x_2$  diperoleh dari kredit, maka harga masukan menjadi lebih mahal, karena terbebani biaya kredit. Apabila  $r_1$  dan  $r_2$  masing-masing adalah biaya marjinal dari modal yang mempengaruhi penggunaan satu satuan masukan  $x_1$  dan  $x_2$ , yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk manambah penggunaan satu satuan masukan  $x_1$  dan  $x_2$ , misalnya tingkat bunga kredit, maka keseimbangan penggunaan masukan menjadi (Baker, 1968):

$$-\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{p_1 + r_1}{p_2 + r_2} \dots\dots\dots (07)$$

Jika diasumsikan hanya masukan  $x_1$  yang dibiayai dari kredit, maka harga satu satuan masukan  $x_1$  menjadi  $p_1+r$  dimana  $r$  adalah biaya kredit yang dibebankan tiap satu satuan masukan  $x_1$  yang dibiayai. Sehingga persamaan keseimbangan penggunaan input yang optimal akan mengalami perubahan menjadi (Kusnadi, 1990):

$$-\frac{dx_2}{dx_1} < \frac{p_1+r}{p_2} \dots\dots\dots (08)$$

Untuk mengimbangi hal ini, maka produsen harus mengurangi jumlah penggunaan masukan  $x_1$ . Apabila jumlah keluaran atau isokuan  $y^0$  tertentu, tetap dipertahankan seperti keadaan semula, maka kebutuhan modal harus ditambah menjadi  $c_1$ . Dengan menambah modal menjadi  $c_1$ , maka akan didapat jalur perluasan usaha (expansion path) yang baru. Tampak jalur perluasan usaha yang baru setelah mendapat kredit cenderung lebih banyak menggunakan masukan  $x_2$ .



Sumber : Baker, 1968

**Gambar 1.** Pengaruh Adanya Kredit terhadap Komposisi Masukan dan Biaya Minimum, serta Jalur Perluasan Usaha

Gambar 1 memperlihatkan penggunaan masukan pada kondisi biaya minimum tanpa adanya biaya kredit diperoleh pada titik A. Sedangkan jalur perluasan usaha tanpa adanya biaya kredit diperlihatkan oleh garis  $S_1$ . Apabila penggunaan masukan  $x_1$  dibiayai dari kredit, maka harga masukan  $x_1$  meningkat menjadi lebih mahal sebesar  $r$ , sehingga komposisi penggunaan masukan optimum diperoleh pada titik B, sehingga jalur perluasan usaha akan berubah menjadi garis  $S_2$  dengan masukan  $x_2$  lebih besar dari sebelumnya (Baker, 1968).

### **2.3. Kinerja Usaha Kecil**

Dalam kegiatan manajemen produksi istilah kinerja seringkali dipergunakan secara bergantian dengan efisiensi dan produktivitas. Namun demikian terdapat perbedaan yang cukup mendasar secara teknis. Efisiensi dan produktivitas lebih menunjukkan kepada ratio keluaran (output) terhadap masukan (input), sedangkan kinerja menunjukkan pengertian lebih luas dari efisiensi dan produktivitas (Adam dan Ronald, 1986). Produktivitas berasal dari kata produk yang berarti barang atau jasa, sehingga merupakan ukuran dari seluruh keluaran produksi dibagi masukan produksi.

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance. Kinerja dapat diartikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Dalam kegiatan usaha kecil, pekerjaan adalah aktivitas memproduksi suatu barang dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja dan ketrampilan tertentu. Suatu pekerjaan mempunyai sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan tersebut. Karena itu kinerja dari kegiatan usaha kecil dapat diukur secara luas, baik dengan ukuran finansial maupun ukuran non finansial.

Menurut (Radnor dan Barnes, 2007), dalam suatu usaha kecil pengukuran kinerja usaha antara lain mengacu pada langkah di tingkat perluasan (broadening) dari unit analisis dan kedalaman (deepening) ukuran kinerja usaha. Hal ini akan memberikan gambaran tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dari usaha kecil, sehingga dapat mendukung perkembangan secara kualitatif dan meningkatkan daya saing (competitiveness) dari usaha kecil.

Ukuran kinerja usaha ini seringkali merupakan sekumpulan pengharapan yang diekspresikan sebagai sekumpulan sasaran yang dapat dirumuskan dalam bentuk hasil penjualan, keuntungan usaha, pangsa pasar, pengembangan hasil produksi, dan penurunan biaya (Dharma, 2005). Pada perspektif keluaran produksi dari kegiatan usaha, variabel kinerja finansial biasanya diukur dengan indikator : penerimaan usaha, keuntungan usaha, pertumbuhan usaha dan ratio keuangan. Sedangkan variabel kinerja non finansial bisa dilihat dari tiga sisi, (1) konsumen, terdiri: harga produk, tipe pasar, kualitas produk, dan distribusi, (2) masyarakat dan pemerintah, terdiri: kepedulian sosial, tingkat limbah, dan regulasi pemerintah, dan (3) pemasok bahan baku, terdiri: lokasi pemasok dan ukuran pemasok.

### **2.4. Hipotesis**

Pengambilan kredit oleh usaha kecil diduga akan mempengaruhi, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan bakar, penggunaan tenaga kerja, penerimaan usaha, pendapatan usaha, serta konsumsi, tabungan, dan pengeluaran pendidikan dan sosial.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga Kabupaten yaitu: Semarang, Magelang, dan Klaten. Penentuan tiga kabupaten ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan: (1) daerah potensial untuk kegiatan usaha kecil, (2) daerah sentra produksi usaha kecil makanan olahan (berbasis bahan baku pertanian) (BPS Semarang, 2003). Penelitian dilaksanakan bulan Februari 2007 s/d Agustus 2007.

### **3.2. Metoda Pengambilan Contoh**

Pengambilan data primer menggunakan data cross-section dengan contoh yang diambil secara acak (random sampling method), sehingga setiap pelaku usaha kecil mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai contoh (sampel). Contoh ditarik dari wilayah yang telah dipilih lebih dahulu, dalam hal ini adalah daerah sentra usaha kecil (wilayah kecamatan). Contoh ditarik dari kelompok populasi sebagai kerangka contoh, tetapi tidak semua anggota

kelompok populasi menjadi anggota contoh. Sehingga didapat contoh usaha kecil antara 9 sampai 15 contoh (sampel) untuk setiap wilayah kecamatan. Jumlah keseluruhan adalah 90 contoh usaha kecil.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer cross-section dari survei yang bersumber dari usaha kecil sebagai contoh. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha kecil menggunakan daftar pertanyaan dengan kuisisioner yang dirancang untuk penelitian ini.

## 4. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

### 4.1. Karakteristik Sosial Ekonomi

Kegiatan usaha kecil yang dilakukan contoh (sampling) mempunyai keragaman cukup tinggi, baik dari umur, jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan.

**Tabel 2.** Karakteristik Rumah Tangga Usaha Kecil

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah Contoh (KK)	15	50	25	90
2. Umur:				
15 - 30 tahun	1	4	2	7
31 - 45 tahun	10	21	9	40
46 - 60 tahun	4	25	14	43
3. Jenis kelamin:				
Laki-laki	9	33	24	66
Perempuan	6	17	1	24
4. Pendidikan:				
SD	4	16	6	26
SMP	5	17	5	27
SMA	5	13	13	31
D3 / Perguruan Tinggi	1	4	1	6

Sumber : Data Primer (diolah)

Dilihat umur pelaku usaha kecil sebagian besar berumur antara 31 – 45 tahun dan 46 – 60 tahun, dimana jumlahnya mencapai 83 contoh dari total 90 contoh (sekitar 92 persen). Hal ini cukup merisaukan jika dilihat dari aspek upaya pengembangan dan keberlanjutan usaha kecil yang sedang digelutinya.



## 4.2. Jenis Usaha Kecil

Jenis usaha kecil yang dilakukan cukup beragam terdiri dari makanan siap konsumsi dan makanan siap olah.

**Tabel 3.** Jenis Usaha Kecil yang Dilakukan

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah Contoh (KK)	15	50	25	90
2. Jenis-jenis Usaha:				
Krupuk kedelai	15			15
Kripik tempe		14		14
Ceriping(pisang,ketela,getuk)		13		13
Rengginang ketan		3		3
Slondok ketela		7		7
Krupuk rambak		13	10	23
Soun mie			15	15
3. Jenis Produk:				
Produk jadi (siap konsumsi)		50	10	60
Produk setengah jadi (siap olah)	15		15	30

Sumber : Data Primer (diolah)

## 4.3. Karakteristik Kredit Mikro dan Kecil

Karakteristik kredit mikro dan kecil dari contoh (sampel), memiliki keragaan yang cukup tinggi, baik pagu kredit, tingkat bunga, dan jenis agunan.

**Tabel 4.** Karakteristik Kredit dan Pinjaman yang Diambil Usaha Kecil

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah contoh (KK)	15	50	25	90
2. Sumber Pinjaman:				
Bank (BRI, BNI, Mandiri, BPD)	-	10	13	23
BPR	-	10	2	12
Koperasi	-	2	9	11
Sumber lainnya	15	28	1	44

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
3. Pengambilan Kredit:				
5 juta rupiah	15	25	9	49
5 s/d 50 juta rupiah	-	24	9	33
> 50 juta rupiah	-	1	7	8
4. Tingkat Bunga Pinjaman:				
12 persen per tahun	-	22	7	29
• 12 s/d 18 persen per tahun	-	5	5	10
• 18 s/d 24 persen per tahun	-	20	13	33
• 24 persen per tahun	15	3	-	18
5. Jenis Agunan:				
Sertifikat Tanah	-	22	15	37
BPKB	-	9	-	9
Tanpa Agunan	15	19	10	44

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel 4, ada beberapa catatan dalam kaitannya dengan hubungan antara usaha kecil dan bank atau sumber pinjaman lainnya, (1) ada usaha kecil yang telah feasible dan bankable, (2) ada usaha kecil yang telah feasible tapi belum bankable, dan (3) sebenarnya masih terdapat pula usaha kecil dan mikro lainnya yang belum terlalu feasible, tapi produktif dalam arti mampu memberikan nilai tambah.

#### 4.4. Karakteristik Perijinan dan Pemasaran Produk

Dalam melakukan kegiatan produksi, usaha kecil juga dihadapkan pada persoalan aspek formal usaha yaitu berupa perijinan dari dinas kesehatan, dinas perindustri dan perdagangan. Jenis perijinan yang dimiliki usaha kecil terdiri dari: ijin Depkes, SIUP, TDI dan TDP. Perijinan ini dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi usaha kecil dalam hal akses pasar, apabila ingin melakukan deversifikasi produk dan menembus pasar nasional dan luar negeri.

**Tabel 5.** Karakteristik Perijinan dan Pemasaran Produk

Diskripsi	Kabupaten			Jumlah
	Semarang	Magelang	Klaten	
1. Jumlah contoh (KK)	15	50	25	90
2. Jenis-jenis Ijin Usaha:				
Depkes	-	7	-	37
Deperindag	3	7	13	22
Depkes dan Deperindag	8	20	-	28
Belum ada ijin usaha	4	16	12	24
3. Lokasi Pemasaran:				
Lokal (Jateng dan DIY)	7	25	10	42
Jawa Barat	1	7	1	9
Jakarta	7	18	5	30
Jawa Timur	-	-	9	9
4. Cara Pembayaran:				
Secara tunai	12	41	9	62
Secara kredit (konsinyasi)	3	9	16	28

Sumber : Data Primer (diolah)

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Pengambilan Kredit

Pengambilan Kredit (PKM) yang dimaksud adalah besarnya jumlah kredit atau pinjaman yang diambil pelaku usaha kecil dalam satu tahun terakhir ini dan dihitung dalam satuan rupiah. Sedangkan jenis kredit dalam penelitian ini meliputi kredit dari bank dan non bank, terutama kredit modal kerja untuk usaha. Kredit dari bank adalah kredit yang diperoleh usaha kecil dari lembaga kredit formal, seperti bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan kredit dari non bank adalah kredit yang berasal dari koperasi simpan pinjam dan pemberi pinjaman informal.

Dari hasil perhitungan, rata-rata besarnya pengambilan kredit oleh setiap usaha kecil per tahun adalah sekitar Rp 16 280 000,-. Pengambilan kredit oleh usaha kecil ini akan menjadi tambahan modal terutama sebagai modal kerja (modal lancar), dengan asumsi bahwa tambahan modal sendiri dari setiap siklus produksi harian untuk membeli bahan baku masih terbatas jumlahnya.

**Tabel 6.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengambilan Kredit (PKM)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	15 104 932	0.0601	
2	Tingkat Bunga Kredit (SBK)	-1 071 138	0.0001 *	-1.2531
3	Tabungan (TABS)	2.6830	0.0145 *	0.8028
4	Pengel. Non Tenaga Kerja (PNTK)	2.5544	0.2239	0.1658
5	Pengalaman Usaha (LTU)	-49 707	0.8314	-0.0405
6	Dummy Sumber Kredit (DSK)	16 640 364	0.0003 *	
R <sup>2</sup> = 0.4090      F Hitung = 11.63      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Beberapa hal penting dapat disimpulkan dari persamaan pengambilan kredit oleh usaha kecil adalah; Pertama, pengambilan kredit memiliki respon yang tinggi terhadap perubahan tingkat bunga kredit. Ini mengindikasikan bahwa pengambilan kredit oleh usaha kecil untuk mengembangkan kegiatan usahanya masih cukup besar. Kedua, pengeluaran tabungan oleh usaha kecil masih cukup rendah, sehingga perlu didorong lagi agar mampu meningkatkan pengambilan kredit lebih tinggi lagi. Ketiga, permintaan kredit oleh usaha kecil makanan olahan yang berasal dari sumber kredit bank menunjukkan pengambilan kredit yang lebih besar dibandingkan pengambilan kredit dari sumber kredit yang berasal dari non bank.

## 5.2. Penggunaan Bahan Baku

Penggunaan Bahan Baku (PBM) merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh usaha kecil untuk membeli bahan baku guna menghasilkan produk makanan olahan dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata pengeluaran untuk penggunaan bahan baku setiap usaha kecil per tahun adalah sekitar Rp 235 990 000 atau sekitar 84 persen dari pengeluaran untuk total biaya produksi.

**Tabel 7.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Bahan Baku (PBM)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	20 367 366	0.6653	
2	Modal Usaha (MOUS)	2.3972	0.0143 *	0.3239
3	Harga Input Produksi (PI)	630.02	0.8509	0.0120
4	Jumlah Tenaga Kerja (JTK)	65 441.69	0.0061 *	0.5778
R <sup>2</sup> = 0.3244      F Hitung = 13.77      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Modal Usaha (MOUS) berpengaruh nyata terhadap Pengeluaran Bahan Baku (PBM). Ini berarti bahwa peningkatan modal akan mampu menaikkan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku. Oleh karena itu upaya mendorong peningkatan modal usaha melalui tambahan kredit bagi usaha kecil akan sangat membantu usaha tersebut dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui tambahan penggunaan bahan baku. Jumlah Tenaga Kerja (JTK) yang digunakan, juga berpengaruh nyata terhadap Penggunaan Bahan Baku (PBM) dengan nilai elastisitas sebesar 0.5778. Jumlah tenaga kerja dalam kegiatan usaha kecil ini masih cukup dominan mengingat usaha kecil makanan olahan ini merupakan kegiatan usaha yang cenderung padat karya dengan masih tergantung pada penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan produksinya mulai dari kegiatan persiapan, produksi dan pengemasan.

### 5.3. Penggunaan Bahan Bakar

Penggunaan Bahan Bakar (PBB) merupakan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar yang meliputi minyak tanah dan kayu bakar dalam kegiatan usaha kecil dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Selama ini bahan bakar yang digunakan oleh usaha kecil adalah minyak tanah dan kayu bakar, dengan jumlah yang dominan adalah kayu bakar. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar per tahun setiap usaha kecil adalah sekitar Rp 17 275 000 , nilai ini mencapai sekitar 6 persen dari total pengeluaran untuk biaya produksi dan merupakan beban bagi usaha kecil yang bergerak untuk menghasilkan produk makanan olahan.

**Tabel 8.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penggunaan Bahan Bakar (PBB)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	5 530 032	0.0001	
2	Modal Usaha (MOUS)	0.15312	0.0001 *	0.2827
3	Pgl. Bahan Bakar M.Tanah (PBBM)	0.86324	0.0001 *	0.3972
R <sup>2</sup> = 0.8876      F Hitung = 343.42      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Modal Usaha (MOUS) berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Bahan Bakar (PBB). Ini berarti bahwa peningkatan modal usaha akan menaikkan penggunaan bahan bakar. Hasil ini mengindikasikan bahwa modal usaha cukup mampu mendorong pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar oleh usaha kecil. Namun demikian peningkatan jumlah penggunaan kayu bakar akibat beralihnya penggunaan minyak tanah perlu dicermati, karena akan mendorong kelangkaan kayu bakar di tingkat lokal dan dapat memicu kenaikan harga kayu bakar. Hal ini bisa menjadi problema kedepan, mengingat adanya kecenderungan sebagian usaha kecil untuk mengurangi biaya produksi dengan cara menekan pengeluaran pada komponen bahan bakar, seperti beralihnya ke penggunaan kayu bakar setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji.

Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tanah (PBBM) juga berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Bahan Bakar (PBB) dengan nilai elastisitas sebesar 0.3972. Penggunaan bahan bakar minyak tanah dalam kegiatan usaha kecil ini sebelumnya masih cukup dominan mengingat harga minyak tanah cukup rendah sekitar Rp 2 300 per liter, karena masih disubsidi oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi persoalan karena setelah adanya konversi bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji, akan membuat usaha kecil beralih ke bahan bakar kayu bakar yang saat ini ketersediaannya di pasar lokal mulai agak sulit didapat.

#### 5.4. Penggunaan Tenaga Kerja

Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) merupakan pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam kegiatan usaha kecil dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat usaha kecil makana olahan merupakan kegiatan usaha yang padat tenaga kerja dan mengandalkan ketrampilan tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang spesifik dan unik sehingga disukai oleh konsumen.

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja per tahun setiap usaha kecil adalah sekitar Rp 27 500 000.

**Tabel 9.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Tenaga Kerja (PTK)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	2 986 745	0.1635	
2	Modal Usaha (MOUS)	0.37557	0.0001 *	0.4352
3	Pengg. Tenaga Kerja Peremp.(PTKP)	0.94921	0.0001 *	0.4562

R<sup>2</sup> = 0.7182      F Hitung = 110.88      Prob > F = 0.0001

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Modal Usaha (MOUS) berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Tenaga Kerja (PTK). Ini berarti bahwa peningkatan modal usaha akan menaikkan pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa modal usaha cukup mampu mendorong penggunaan tenaga kerja. Selama ini kebutuhan tenaga kerja untuk usaha kecil ini didapat dari wilayah setempat di desa tersebut dimana usaha kecil tersebut berada, namun demikian di beberapa tempat seperti: usaha kecil yang memproduksi soun di Ngawen Klaten, terdapat usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja terutama laki-laki, berasal dari luar wilayah setempat yaitu: dari Boyolali, yang merantau musiman atau sementara. Ini juga menunjukkan kebutuhan tenaga kerja terus mengalami perubahan dan adanya kebutuhan terhadap kesesuaian tenaga kerja yang spesifik dengan karakteristik usaha kecil yang mengandalkan ketrampilan tenaga kerja.

Pengeluaran untuk Penggunaan Tenaga Kerja Perempuan (PTKP) juga berpengaruh nyata terhadap pengeluaran untuk Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) dengan nilai elastisitas sebesar 0.4550. Pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja perempuan dalam kegiatan usaha kecil ini masih cukup dominan mengingat jumlahnya sekitar 46 persen dari pengeluaran tenaga kerja. Ini menunjukkan tenaga kerja perempuan memiliki kontribusi cukup besar terhadap keberlangsungan usaha kecil makanan olahan, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

#### 5.5. Penerimaan Usaha

Penerimaan Usaha (PENU) adalah penerimaan usaha kecil yang merupakan nilai penjualan hasil produksi (kuantitas hasil dikalikan harga jual produk) yang dihasilkan oleh usaha kecil dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Besarnya nilai penjualan hasil produksi rata-rata untuk setiap usaha kecil adalah sekitar Rp 384 890 000, dengan nilai rata-rata ini menunjukkan nilai penjualan tahunan dari usaha ini tersebut termasuk dalam kategori usaha kecil (UU. No.20 Tahun 2008), yaitu menghasilkan nilai penjualan tahunan diatas Rp 300 000 000.

**Tabel 10.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penerimaan Usaha (PENU)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	-13 490 000	0.4144	
2	Peng. Bahan Baku (PBM)	1.03637	0.0001 *	0.6354
3	Peng. Bahan Bakar (PBB)	1.49155	0.0080 *	0.0669
4	Peng. Tenaga Kerja (PTK)	2.99643	0.0001 *	0.2142
5	Harga Produk (PO)	2 714.44	0.0082 *	0.0693
6	Dummy Pemasaran Produk (DPP)	35 448 025	0.0501 *	

R<sup>2</sup> = 0.9558    F Hitung = 363.28    Prob > F = 0.0001

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Penggunaan Bahan Baku (PBM) berpengaruh nyata dan responsif terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas 0.6354. Respon penerimaan usaha oleh perubahan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku menentukan besarnya penerimaan usaha, dimana kenaikan penggunaan bahan baku akan menaikkan penerimaan usaha. Respon ini terjadi karena kenaikan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku akan menyebabkan bertambahnya penggunaan bahan baku untuk memproduksi produk usaha kecil.

Penggunaan Bahan Bakar (PBB) juga berpengaruh nyata dan responsif terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas sebesar 0.0669. Respon penerimaan usaha oleh perubahan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar ini menunjukkan, bahwa kenaikan penggunaan bahan bakar akan menaikkan penerimaan usaha. Respon ini walaupun kecil, menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar akan menyebabkan bertambahnya kuantitas produk meningkat sehingga menaikkan penerimaan usaha. Penggunaan bahan bakar yang sesuai dengan jenis kegiatan produksi yang dilakukan usaha kecil, akan menyebabkan efisiensi dalam proses produksi sehingga kuantitas produksi meningkat.

Sedangkan Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) juga berpengaruh nyata dan responsif terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas sebesar 0.2142. Respon ini menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja akan menyebabkan bertambahnya kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan meningkat sehingga menaikkan penerimaan usaha. Penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha kecil dan kualitas produk yang diinginkan oleh pasar, akan menyebabkan efisiensi sehingga kuantitas dan kualitas produk akan meningkat sehingga penerimaan usaha juga meningkat. Keuntungan yang spesifik dari penggunaan tenaga kerja ini adalah meningkatnya kualitas produk sesuai yang diinginkan dan berkurangnya bahan baku yang terbuang.

Harga Jual Produk (PO) berpengaruh nyata terhadap Penerimaan Usaha (PENU) dengan nilai elastisitas sebesar 0.0693. Respon yang relatif kecil dari penerimaan usaha oleh perubahan tingkat harga jual produk ini diduga karena tingkat harga jual produk di pasar sangat bersaing dan masing-masing produk telah memiliki segmen pasar dan wilayah pasar yang tersendiri. Namun setiap produk masih bisa kompetitif, sehingga cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan usaha kecil. Karena itu upaya-upaya untuk memperkuat kegiatan produksi dan pemasaran produk, terutama: ketrampilan tenaga kerja, sarana pemasaran dan cara pembayaran, sangatlah diperlukan agar diperoleh tingkat harga yang lebih tinggi.

Dummy Pemasaran Produk (DPP) yaitu: 0 adalah meliputi wilayah Jateng dan Yogyakarta, dan 1 adalah meliputi hingga wilayah Jatim, Jabar, serta Jakarta dan sekitarnya, berpengaruh nyata terhadap Penerimaan

Usaha (PENU). Luasnya wilayah pemasaran produk menembus luar wilayah Jateng dan Yogyakarta, secara nyata mampu meningkatkan penerimaan usaha dimana usaha kecil dengan wilayah pemasaran yang lebih luas memiliki tingkat penerimaan usaha yang lebih tinggi.

Dari nilai koefisien elastisitas dari persamaan penerimaan usaha ini, ada beberapa catatan yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, pengeluaran untuk total biaya produksi mampu mendorong kenaikan penerimaan usaha secara responsif, Kedua, penerimaan usaha kecil juga dipengaruhi secara nyata oleh harga jual produk. Karena itu apabila terjadi kenaikan biaya produksi, sementara harga jual produk relatif tetap, maka akan sangat memberatkan usaha kecil. Ketiga, pelaku usaha yang memiliki wilayah pemasaran produk di Yogyakarta dan luar Jateng mempunyai penerimaan usaha yang lebih tinggi.

## 5.6. Tabungan

Tabungan (TABS) adalah jumlah uang yang disisihkan untuk disimpan oleh usaha kecil baik di bank dan lembaga lainnya (koperasi atau kelompok simpan pinjam) atau disimpan di rumah dalam satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Besarnya nilai tabungan rata-rata per tahun setiap usaha kecil sekitar Rp 4 870 000.

Pendapatan Usaha (PEND) berpengaruh nyata terhadap Tabungan (TABS) dengan nilai elastisitas sebesar 0.1315. Rendahnya respon tabungan oleh perubahan pendapatan usaha ini menunjukkan bahwa perilaku menabung pada pelaku usaha kecil ini masih rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu akses pelaku usaha kecil untuk menabung juga masih belum baik, akibat ketersediaan fasilitas lembaga keuangan (bank) di wilayah sentra-sentra usaha kecil juga masih sedikit.

**Tabel 11.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Tabungan (TABS)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	2 205 311	0.0140	
2	Pendapatan Usaha (PEND)	0.00615	0.0182 *	0.1315
3	Jumlah Anggota Keluarga(JAK)	-282 239	0.1053 **	-0.2401
4	Tingkat Pendidikan (TP)	664 601.6	0.0014 *	0.4517
5	Dummy Kelemb.Tabungan (DJST)	3 583 772	0.0001 *	
R <sup>2</sup> = 0.5678		F Hitung = 27.92	Prob > F = 0.0001	

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

\*\* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.20

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil ini adalah. Pertama, pendapatan usaha yang diperoleh usaha kecil berpengaruh positif terhadap tabungan. Kedua, kemampuan pelaku usaha kecil untuk menabung masih dipengaruhi oleh beban pengeluaran yang ditimbulkan oleh bertambahnya jumlah anggota keluarga, semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin berkurang jumlah tabungan, karena itu perlu upaya untuk tetap menjaga dan mendorong kebiasaan dan perilaku menabung bagi pelaku usaha kecil. Ketiga, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh usaha kecil berpengaruh positif terhadap tabungan. Keempat, berkenaan dengan kebiasaan menabung yang masih rendah diantara pelaku usaha kecil, maka sudah mendesak saatnya untuk mendorong lembaga keuangan formal yang juga mempunyai komitmen besar dalam memobilisasi tabungan secara efektif.



## 5.7. Konsumsi

Konsumsi (PKON) merupakan pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan listrik dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Nilai konsumsi rata-rata per tahun pada usaha kecil ini sekitar Rp 22 350 000.

**Tabel 12.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Konsumsi (PKON)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	4 479 184	0.0643	
2	Pendapatan Usaha (PEND)	0.01883	0.0654 *	0.0877
3	Jumlah Anggota Keluarga (JAK)	1 483 237	0.0021 *	0.2749
4	Tingkat Pendidikan (TP)	-553 154	0.3219	-0.0819
5	Konsumsi Tenaga Kerja (KTK)	1.31575	0.0001 *	0.5190
R <sup>2</sup> = 0.8387      F Hitung = 110.51      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Pendapatan Usaha(PEND) berpengaruh nyata terhadap Konsumsi (PKON) dengan nilai elastisitas sebesar 0.0877. Rendahnya respon ini diduga karena jenis pengeluaran untuk konsumsi yang dikeluarkan merupakan konsumsi untuk kebutuhan rutin yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Hal menarik dari hasil ini adalah. Pertama, pendapatan bersih usaha mempunyai pengaruh nyata terhadap konsumsi namun dengan respon yang relatif rendah. Kedua, jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata terhadap konsumsi dengan respon yang cukup tinggi, sehingga kenaikan jumlah anggota keluarga akan menyebabkan tambahan pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran konsumsi. Ketiga, konsumsi tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap pengeluaran konsumsi oleh usaha kecil dengan respon yang cukup tinggi.

## 5.8. Pengeluaran Pendidikan dan Sosial

Pengeluaran pendidikan dan sosial adalah pengeluaran oleh pelaku usaha kecil yang digunakan untuk pendidikan anggota keluarga dan kegiatan sosial masyarakat dalam periode satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Besarnya nilai pengeluaran untuk pendidikan dan sosial per tahun adalah sekitar Rp 6 200 000 , berarti setiap bulan sekitar lima ratus ribu rupiah.

**Tabel 13.** Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS)

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob >  t	Elastisitas
1	Intersep	-3 467 540	0.0016	
2	Pendapatan Usaha (PEND)	0.017714	0.0001 *	0.2972
3	Jumlah Anak Sekolah (JAS)	4 092 241	0.0001 *	1.0843
4	Pengeluaran Sosial (PSO)	0.42049	0.2073	0.1401
5	Dummy Jenis Kelamin (DJG)	305 509	0.6938	
R <sup>2</sup> = 0.6421      F Hitung = 38.12      Prob > F = 0.0001				

Sumber: hasil olah data

Keterangan: \* = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 0.10

Pendapatan Usaha (PEND) berpengaruh nyata terhadap Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS) dengan nilai elastisitas sebesar 0.2972. Respon cukup rendah ini diduga karena pengeluaran untuk pendidikan dan sosial yang dikeluarkan ini merupakan investasi yang cukup mendasar dan jangka panjang sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan besarnya pendapatan bersih usaha.

Beberapa hal yang menonjol dari hasil ini adalah. Pertama, pendapatan usaha dari kegiatan usaha kecil mampu mendorong pengeluaran untuk pendidikan, dan sosial dalam bentuk pengeluaran yang bersifat jangka panjang dan intangible. Hal ini akan memperkuat ikatan sosial diantara usaha kecil yang umumnya berada dalam kawasan usaha yang sama (sentra produksi). Kedua, besarnya respon dari pengeluaran pendidikan dan sosial oleh jumlah anak sekolah yang dimiliki usaha kecil, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pendidikan anak (investasi jangka panjang) di kalangan usaha kecil sangat tinggi. Ketiga, masih terlihat adanya kesadaran pelaku usaha kecil untuk melakukan kewajiban dan kepedulian sosial sebagai bagian memperkuat modal sosial di masyarakat. Keempat, dummy jenis kelamin tidak berpengaruh nyata terhadap pengeluaran pendidikan dan sosial. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaku usaha kecil baik itu perempuan ataupun laki-laki, terhadap pendidikan dan sosial adalah relatif sama baiknya.

## **6. ANALISIS KEBIJAKAN**

Secara teoritis tujuan dari suatu simulasi kebijakan adalah untuk menganalisis dampak dari berbagai alternatif kebijakan dengan jalan mengubah dari salah satu atau beberapa nilai variabel atau instrumen kebijakan (policy instrument).

### **6.1. Dampak Perubahan Suku Bunga Kredit**

Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap dampak perubahan Suku Bunga Kredit (SBK), yaitu kredit yang diambil oleh pelaku usaha kecil. Penurunan suku bunga kredit ini dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui mekanisme subsidi bunga atau penjaminan kredit, sehingga risiko pinjaman akan menurun dan suku bunga kredit menjadi lebih rendah, seperti misalnya pada program Kredit Untuk Rakyat (KUR). Mekanisme ini sangat bermanfaat bagi usaha kecil yang pada umumnya sangat feasible tapi masih belum bankable.

Simulasi 1 adalah simulasi dampak penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen. Dengan tingkat bunga kredit rata-rata saat ini yang dinikmati oleh usaha kecil sebesar 19.05 persen per tahun, maka penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen diharapkan akan membuat suku bunga kredit turun menjadi 15.24 persen per tahun atau 1.27 persen per bulan. Penurunan SBK sebesar 20 persen akan berdampak positif terhadap seluruh variabel endogen. Kenaikan paling besar di dapat variabel PKM dan MOUS, masing-masing sebesar 25.45 persen dan 12.99 persen. Perubahan pada variabel Pengambilan Kredit (PKM) ini cukup elastis, karena itu penurunan suku bunga kredit memberikan dampak positif yang besar terhadap PKM dan MOUS.

### **6.2. Dampak Kenaikan Pengambilan Kredit**

Simulasi.2 digunakan untuk melihat dampak kenaikan Pengambilan Kredit (PKM) sebesar 100 persen. Kenaikan pengambilan kredit ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui dua cara; pertama, secara langsung dengan kebijakan pemberian dan perluasan skim-skim kredit baru dengan plafon kredit yang lebih besar, terutama di bank-bank pemerintah; kedua, secara tidak langsung melalui himbuan (suasion) dan insentif terhadap bank-bank non pemerintah dan lembaga non bank, yang memberikan kredit kepada usaha kecil dengan plafon kredit yang lebih besar.

Kenaikan pengambilan kredit ini akan meningkatkan jumlah kredit yang diambil usaha kecil dari sekitar Rp 16 280 000 menjadi Rp 32 560 000. Perubahan ini akan mendorong peningkatan pada variabel endogen lainnya meliputi: Modal Usaha (MOUS) 51.07 persen, Total Biaya Produksi (TBP) 17.10 persen, Penerimaan Usaha (PENU) 16.33 persen, dan Pendapatan Usaha (PEND) 14.28 persen, serta Penggunaan Bahan Baku (PBM) 16.68 persen, Penggunaan Tenaga Kerja (PTK) 22.23 persen, dan Penggunaan Bahan Baku (PBB) sebesar 14.43 persen.

### 6.3. Dampak Perubahan Sumber Kredit

Dummy Sumber Kredit (DSK) juga mempunyai arti yang penting dalam meningkatkan jumlah pengambilan kredit, karena usaha kecil yang memperoleh sumber kredit dari bank memiliki tingkat pengambilan kredit (pinjaman) yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha kecil yang memperoleh sumber pinjaman dari lembaga non bank. Dummy Sumber Kredit (DSK) yaitu: 0 adalah sumber pinjaman (kredit) dari non bank, dan 1 adalah sumber kredit dari bank. Perubahan sumber kredit terutama dari non bank ke sumber kredit dari bank, dapat didorong dan difasilitasi oleh pemerintah melalui kegiatan pendampingan secara individu atau kelompok terutama kepada usaha kecil yang telah feasible tetapi belum bankable, sehingga mampu memiliki akses yang baik terhadap perbankan.

Hasil simulasi 3 yaitu perubahan sumber kredit dari non bank ke sumber kredit dari bank, memberikan dampak positif terhadap seluruh variabel endogen. Dampak terbesar pada variabel endogen: PKM meningkat 63.41 persen, MOUS meningkat 32.38 persen, PENU meningkat 10.36 persen dan PEND meningkat 9.06 persen.

Sedangkan simulasi 4 adalah perubahan sumber kredit dari sumber kredit bank menjadi sumber kredit dari non bank juga akan mempengaruhi jumlah permintaan kredit, karena usaha kecil yang memperoleh sumber kredit dari non bank memiliki tingkat permintaan kredit (pinjaman) yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil yang memperoleh sumber pinjaman dari lembaga bank. Hasil simulasi ini yaitu perubahan sumber kredit dari lembaga bank ke non bank memberikan dampak yang negatif terhadap seluruh variabel endogen yaitu: PKM, MOUS, PBM, PTK, PBB, TBP, PENU, PEND, TABS, PKON, dan PPKS. Dampak terbesar terjadi pada dua variabel endogen: Pengambilan Kredit (PKM) berkurang 40.35 persen dan Modal Usaha (MOUS) berkurang 20.60 persen.

### 6.4. Dampak Kenaikan Harga Jual Produk

Harga Jual Produk (PO) juga turut menentukan besarnya penerimaan usaha kecil, simulasi 5 adalah simulasi yang digunakan untuk melihat dampak kenaikan Harga Jual Produk (PO) sebesar 10 persen terhadap variabel-variabel endogen lainnya. Kenaikan harga jual produk ini dapat terjadi apabila pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan prasarana transportasi lainnya, terutama di daerah-daerah perdesaan dimana terdapat banyak sentra-sentra usaha kecil. Peningkatan infrastruktur ini akan memberikan peluang lebih baik bagi produk-produk usaha kecil makanan olahan untuk dipasarkan ke wilayah lain, sehingga diperoleh harga jual yang lebih tinggi. Perbaikan prasarana dan sarana ini secara tidak langsung akan menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan usaha kecil.

Perubahan akibat adanya kenaikan Harga Jual Produk (PO) sebesar 10 persen ini akan mendorong peningkatan paling besar pada variabel Pendapatan Usaha (PEND) dan Penerimaan Usaha (PENU), masing-masing sebesar 2.65 persen, dan 0.74 persen, sedangkan variabel endogen lainnya lebih rendah dari nilai tersebut. Dampak yang terjadi oleh kenaikan harga jual produk ini tidaklah besar, yang diduga karena elastisitas jangka pendek dari variabel eksogen Harga Jual Produk (PO) sangat kecil sekitar 0.069, dengan demikian kebijakan tunggal pada variabel ini tidaklah mempunyai dampak yang cukup berarti, sehingga perlu dilakukan simulasi kebijakan secara simultan dengan kombinasi perubahan variabel endogen maupun variabel eksogen lainnya. Salah satu variabel endogen yang layak digunakan untuk kombinasi simulasi adalah variabel Pengambilan Kredit (PKM).

### 6.5. Dampak Perubahan Daerah Pemasaran Produk

Perubahan daerah pemasaran produk dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memperbaiki kelembagaan pemasaran produk dan sarana transportasi, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk mengikuti kegiatan pameran dagang, pelatihan maupun lokakarya (workshop) baik di tingkat regional ataupun nasional, serta memberikan subsidi terhadap transportasi umum bagi produk-produk usaha kecil. Kesempatan untuk mengikuti pameran dagang ini bagi usaha kecil akan mendorong kemampuan daya saing produk, sehingga mampu menembus pasar regional, nasional, atau bahkan pasar ekspor. Kegiatan semacam ini secara tidak langsung juga dapat mensinergikan usaha kecil dengan pelaku usaha menengah maupun besar.

Simulasi perubahan daerah pemasaran produk ini dilakukan dengan menggunakan variabel Dummy Pemasaran Produk (DPP). Dummy pemasaran produk juga mempunyai arti yang penting dalam meningkatkan jumlah pengambilan kredit, karena usaha kecil yang mempunyai wilayah atau daerah pemasaran produk yang lebih luas diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah (kuantitas) penjualan yang lebih besar karena mempunyai pasar yang lebih luas.

Hasil simulasi 6 yaitu perubahan daerah pemasaran produk dari hanya wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran produk hingga mencakup juga wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, diharapkan mempunyai dampak positif terhadap seluruh variabel endogen. Dampak terbesar terjadi pada tiga variabel endogen yaitu: Pendapatan Usaha (PEND) oleh usaha kecil meningkat 16.14 persen, Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS) meningkat 4.80 persen, dan Penerimaan Usaha (PENU) meningkat 4.60 persen. Dari simulasi ini terlihat bahwa perluasan daerah pemasaran akan mampu mendorong peningkatan omset penjualan, sehingga penerimaan usaha dan pendapatan usaha meningkat.

Sedangkan simulasi 7 perubahan daerah pemasaran produk dari wilayah pemasaran yang mencakup hingga Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya menjadi hanya wilayah pemasaran produk di Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga akan mempengaruhi variabel-variabel endogen lainnya. Hasil simulasi ini memberikan dampak yang negatif terhadap seluruh variabel endogen. Dampak terbesar terjadi pada tiga variabel endogen yaitu: pendapatan usaha (PEND) oleh usaha kecil berkurang 18.45 persen, pengeluaran pendidikan (PPKS) berkurang 5.48 persen, dan penerimaan usaha (PENU) berkurang 5.26 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada saat sekarang ini, daerah pemasaran produk masih cukup besar terkonsentrasi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

## **6.6. Dampak Kombinasi Simulasi Kebijakan**

Simulasi 8 adalah kombinasi simulasi 2 dan simulasi 5, yaitu untuk melihat dampak kenaikan Pengambilan Kredit (PKM) sebesar 100 persen dan kenaikan Harga Jual Produk (PO) sebesar 10 persen secara simultan. Dampak dari simulasi ini adalah adanya kenaikan variabel-variabel endogen lainnya, dengan dampak paling besar pada kenaikan Modal Usaha (MOUS) sebesar 51.07 persen, sedangkan Total Biaya Produksi (TBP) meningkat 17.10 persen, Penerimaan Usaha (PENU) meningkat 17.03 persen, dan Pendapatan Usaha (PEND) meningkat 16.84 persen.

Adanya kombinasi simulasi dengan melakukan perubahan secara simultan pada dua variabel, yaitu kenaikan pengambilan kredit dan kenaikan harga jual produk, akan terlihat dampaknya pada kenaikan lebih tinggi di beberapa variabel endogen, terutama variabel penerimaan usaha, pendapatan usaha, dan total biaya produksi.

Sedangkan skenario 9 meliputi simulasi terhadap dampak kebijakan kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen dan perluasan wilayah pemasaran dari hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Dampak dari simulasi ini adalah kenaikan variabel-variabel endogen lainnya secara lebih signifikan, terjadi peningkatan modal usaha sebesar 51.07 persen, total biaya produksi meningkat 17.10 persen, sedangkan penerimaan usaha meningkat 20.65 persen, dan pendapatan usaha meningkat sebesar 30.18 persen. Simulasi ini menggabungkan perubahan pada variabel pengambilan kredit dan dummy pemasaran produk.

Dari hasil simulasi terdapat kenaikan variabel-variabel endogen lainnya, yang lebih tinggi dibandingkan dengan simulasi sebelumnya. Hal ini karena pada simulasi 6 sebelumnya, yaitu perluasan daerah pemasaran produk hingga mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, juga terjadi kenaikan yang besar pada variabel pendapatan usaha dan penerimaan usaha.

Skenario 10 adalah simulasi yang digunakan untuk melihat dampak kebijakan kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen, kenaikan harga jual produk sebesar 10 persen dan perluasan wilayah pemasaran dari hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Dampak dari kebijakan ini akan menaikkan variabel-variabel endogen lainnya secara lebih signifikan, terjadi kenaikan modal usaha sebesar 51.07 persen, total biaya produksi meningkat 17.10 persen, sedangkan penerimaan usaha meningkat 21.35 persen, dan pendapatan usaha meningkat tajam 32.75

persen. Sedangkan pengeluaran untuk penggunaan bahan baku meningkat 16.69 persen, pengeluaran untuk penggunaan tenaga kerja meningkat 22.23 persen, dan pengeluaran untuk penggunaan bahan bakar meningkat 14.43 persen. Pada skenario ini simulasi yang dilakukan pada tiga variabel sekaligus, memberikan dampak yang besar terhadap semua variabel endogen lainnya.

## 6.7. Rekapitulasi Simulasi Kebijakan

Untuk memberikan gambaran simulasi kebijakan yang telah dibuat, akan disajikan rangkuman atau rekapitulasi yang merupakan ikhtisar dari seluruh simulasi kebijakan. Dari tabel dibawah terlihat bahwa delapan simulasi kebijakan yaitu: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10 merupakan simulasi pilihan untuk melakukan kebijakan. Hal ini berarti delapan alternatif kebijakan tersebut akan memberikan dampak kenaikan terhadap seluruh variabel endogen, yaitu: pengambilan kredit, modal usaha, penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, penggunaan bahan bakar, total biaya produksi, penerimaan usaha, pendapatan usaha, pengeluaran pendidikan dan sosial, tabungan, dan konsumsi.

**Tabel 14.** Presentasi Perubahan Nilai Rata-rata Variabel Endogen Akibat Beberapa Simulasi Kebijakan

Variabel	Nilai Dasar	Simulasi Kebijakan (%)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengambilan Kredit (PKM)	16 282 049	25.45	100.00	63.41	-40.35	0.28	1.70	-1.95	100.00	100.00	100.00
Modal Usaha (MOUS)	31 887 605	12.99	51.07	32.38	-20.60	0.14	0.87	-0.99	51.07	51.07	51.07
Penggunaan Bahan Baku (PBM)	233 910 000	4.25	16.69	10.58	-6.73	0.04	0.28	-0.33	16.69	16.69	16.69
Penggunaan Tenaga Kerja (PTK)	27 517 423	5.66	22.23	14.09	-8.97	0.06	0.38	-0.43	22.23	22.23	22.23
Penggunaan Bahan Bakar (PBB)	17 275 175	3.67	14.43	9.15	-5.82	0.04	0.25	-0.28	14.43	14.43	14.43
Total Biaya Produksi (TBP)	278 700 000	4.35	17.10	10.84	-6.90	0.05	0.29	-0.33	17.10	17.10	17.10
Penerimaan Usaha (PENU)	382 730 000	4.15	16.33	10.36	-6.59	0.74	4.60	-5.26	17.03	20.65	21.35
Pendapatan Usaha (PEND)	104 030 000	3.63	14.28	9.06	-5.76	2.61	16.14	-18.45	16.84	30.18	32.75
Tabungan (TABS)	4 871 744	0.48	1.88	1.19	-0.76	0.34	2.12	-2.42	2.21	3.97	4.30
Konsumsi (PKON)	22 357 864	0.32	1.25	0.79	-0.51	0.23	1.42	-1.62	1.48	2.65	2.87
Pengeluaran Pendidikan dan Sosial (PPKS)	6 204 833	1.08	4.24	2.69	-1.71	0.77	4.80	-5.48	5.00	8.97	9.73

Sumber: hasil olah data

### Keterangan Simulasi Kebijakan :

1. Penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen.
2. Kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen.
3. Perubahan sumber kredit dari non bank menjadi sumber kredit yang berasal dari bank (dummy = 1)
4. Perubahan sumber kredit dari bank menjadi sumber kredit dari non bank (dummy = 0)
5. Kenaikan harga jual produk sebesar 10 persen
6. Perluasan daerah pemasaran produk dari hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi wilayah pemasaran mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya (dummy = 1)
7. Perubahan daerah pemasaran produk dari mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, menjadi hanya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah (dummy = 0)
8. Kombinasi simulasi 2 dan simulasi 5.
9. Kombinasi simulasi 2 dan simulasi 6.
10. Kombinasi simulasi 2, simulasi 5 dan simulasi 6.

Apabila tujuan utama kebijakan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan nilai rata-rata variabel endogen pengambilan kredit oleh usaha kecil, maka alternatif kebijakan simulasi 1 dan simulasi 3 yaitu penurunan suku bunga kredit sebesar 20 persen, dan perubahan sumber kredit dari non bank menjadi sumber kredit dari bank, adalah merupakan pilihan yang terbaik, yaitu akan meningkatkan pengambilan kredit oleh usaha kecil masing-masing sebesar 25.45 persen dan 63.41 persen. Alternatif ini sangat erat berkaitan dengan kebijakan di bidang moneter khususnya perbankan.

Sedangkan apabila tujuan utama kebijakan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan nilai rata-rata variabel endogen penerimaan usaha dan pendapatan usaha, serta maka seluruh variabel endogen lainnya, maka alternatif kebijakan pilihannya adalah simulasi 9 dan 10. Simulasi 9 kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen, perubahan dummy wilayah pemasaran hingga Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta sekitarnya, akan meningkatkan penerimaan usaha sebesar 20.65 persen dan meningkatkan pendapatan usaha sebesar 30.18 persen.

Simulasi 10 kenaikan pengambilan kredit sebesar 100 persen, kenaikan harga jual produk sebesar 10 persen, dan perubahan dummy wilayah pemasaran hingga Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta sekitarnya, akan meningkatkan penerimaan usaha sebesar 21.35 persen dan meningkatkan pendapatan usaha sebesar 32.75 persen. Alternatif kebijakan pada simulasi 9 dan simulasi 10 ini erat berkaitan dengan kebijakan di perbankan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan kelembagaan pemasaran. Karena itu kebijakan simultan ini memerlukan koordinasi yang baik antar kementerian terkait dan pihak perbankan, sehingga implementasi kebijakan di lapangan dapat dirasakan langsung oleh usaha kecil.

## **7. PENUTUP**

### **7.1. Kesimpulan**

1. Kredit mikro dan kecil berpengaruh terhadap penerimaan usaha yang merupakan indikator kinerja usaha kecil. Penerimaan usaha merupakan komponen utama pendapatan bersih usaha yang akan mendorong peningkatan terhadap pengeluaran untuk pendidikan dan sosial, konsumsi, dan tabungan yang dilakukan usaha kecil.
2. Kredit mikro dan kecil yang diambil oleh usaha kecil ini akan meningkat dengan adanya penurunan suku bunga kredit, sehingga akan menambah modal usaha. Peningkatan modal usaha akan meningkatkan penggunaan bahan baku, bahan bakar dan tenaga kerja, sehingga meningkatkan penerimaan usaha.
3. Kebijakan kenaikan pengambilan kredit oleh usaha kecil akan memberikan dampak kenaikan paling besar berturut-turut pada: modal usaha, penggunaan bahan baku, penerimaan usaha, dan pendapatan usaha. Sedangkan kombinasi kebijakan kenaikan pengambilan kredit oleh usaha kecil, kenaikan harga jual produk, dan perluasan wilayah pemasaran hingga mencapai Jatim, Jabar, Jakarta dan sekitarnya secara bersamaan, akan memberikan kenaikan paling besar berturut-turut pada: modal usaha, pendapatan usaha, penerimaan usaha, dan penggunaan bahan baku.

### **7.2. Implikasi Kebijakan**

Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dimunculkan.

1. Besarnya respon yang ditunjukkan oleh suku bunga kredit terhadap kredit yang diambil oleh usaha kecil, perlu diikuti dengan kebijakan perbankan antara lain dengan memperbanyak skim kredit dengan suku bunga yang rendah, sehingga dapat menjadi sumber tambahan modal usaha yang kompetitif bagi usaha kecil. Selain itu pemerintah dan perbankan perlu terus mengembangkan berbagai jenis skim kredit yang mampu mengakomodasi kondisi usaha kecil, dengan memberikan kelonggaran atau insentif dari sisi agunan (collateral) dan memperluas jangkauan kredit tersebut hingga mencapai wilayah sentra-sentra usaha kecil yang berada di perdesaan.

2. Untuk meningkatkan kinerja usaha kecil terutama usaha kecil yang telah layak usaha (*feasible*) dan lokasinya berdekatan dengan bank dan sudah memiliki akses yang baik terhadap bank (*bankable*), perlu didorong dan difasilitasi agar dapat memperoleh skim kredit baru dari bank sehingga mendapatkan pinjaman yang lebih besar, agar dapat memenuhi kebutuhan modal usaha yang semakin meningkat, antara lain dengan mempermudah prosedur pinjaman dan memperbesar plafon kredit.
3. Untuk usaha kecil yang masih mengandalkan sumber kredit atau pinjaman dari lembaga non bank (koperasi simpan pinjam dan sumber pinjaman lainnya), pemerintah perlu terus mendorong keberadaan dan keberlanjutan lembaga non bank tersebut melalui penguatan sumber dan struktur pendanaan lembaga tersebut, penguatan kelembagaan, dan pengaturan (*regulasi*) yang jelas, sehingga mampu menjangkau usaha kecil yang telah *feasible* tapi belum *bankable*, atau usaha lainnya yang produktif belum tapi belum *feasible*.
4. Saran untuk penelitian lanjutan adalah agar dilakukan penelitian tentang, (a) peranan kredit terhadap peningkatan kinerja usaha kecil, dengan membuat disagregasi berdasarkan: karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan, dan (b) peranan kredit terhadap peningkatan kinerja usaha kecil di beberapa jenis usaha diluar usaha makanan olahan, seperti: minuman, tekstil dan pakaian (*garmen*), kerajinan kulit dan kayu, atau pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., (2006), Perbankan Sepatutnya Lebih Serius Garap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kompas, 10 Maret 2006.
- Adam, E.E. and J.E. Ronald, (1986), *Production and Operations Management: Concepts, Models and Behavior*. Third Edition. Prentice-Hall International, London.
- Arsyad, L. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainability*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Anderson, C.L., A. Locker and R. Nugent, (2002), "Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources", *World Development Journal*, 30(1), pp. 29-42.
- Ashari, (2009a), "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(1), pp. 21-42.
- \_\_\_\_\_, (2009b), "Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: Apakah Agenda Mendesak", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(1), pp. 13-27.
- Asian Development Bank, (2010), *Microfinance: Definition, Sources and Problems*. <http://microfinancehub.com/2010/01/31/what-is-microfinance-definition-sources-problems>.
- Badan Pusat Statistik, (2006), *Sensus Ekonomi Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Semarang, (2003), *Direktori Industri Kecil Jawa Tengah 2003*. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- \_\_\_\_\_, (2006), *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik, Semarang.
- \_\_\_\_\_, (2007), *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007*. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2009*. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- Baker, C.B., (1968), "Credit in the Production Organization of the Firm", *American Journal of Agricultural Economics*, 50(3), pp. 507-520.

- Bank Indonesia, (2005), Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2006), Laporan Perekonomian Indonesia 2006, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia Semarang, (2008), Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah: Profil UMKM Peserta Jateng Fair 2008, Bank Indonesia, Semarang.
- Becker, G.S., (1976), *The Economic Approach to Human Behavior*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Chaves, R.A. and C. Gonzales-Vega, (1996), "The Design of Successful Rural Financial Intermediaries", *World Development Journal*, 24(1), pp. 77-94.
- Dharma, S., (2005), *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Evenson, R.E., (1976), "On The New Household Economics", *Journal of Agricultural Economics and Development*, 6 (1), pp. 87-107.
- Fariyanti, A., (2008), "Perilaku Ekonomi Rumah tangga Petani Sayuran dalam Menghadapi Risiko Produksi dan Harga Produk di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung", Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Firdaus, H.R., (2004), *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, M., (2008), *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Henderson, J.M. and R.E. Quandt, (1980), *Microeconomics Theory, A Mathematical Approach*, Third Edition. McGraw-Hill International Company, Tokyo.
- Hollis, A. and A. Sweetman, (1998), "Microcredit: What Can We Learn from the Past?", *World Development Journal*, 26(10), pp. 34-56.
- Hyman, D.N., (1997), *Microeconomics*, Fourth Edition. Irwin / McGraw-Hill International Company, New York.
- Intriligator, M., (1996), *Econometric Models, Techniques and Applications*, Second Edition. Prentice-Hall, New Jersey.
- Kamerschen, D., (1984), *Money and Banking*, Eighth Edition. South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
- Kemenkop dan UKM., (2006), *Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2004-2005*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2007-2008*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- Koutsoyiannis, A., (1977), *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*, Second Edition. The Macmillan Press Ltd, London.
- Krause, K.R., (1969), "Application of the Financial Management Function in the Family Size Farm Firm", *American Journal of Agricultural Economics*, 51(5), pp. 1536-1542.
- Kuncoro, M., (2003), "Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", <http://website.mudrajad.com/journals>.
- Kuntjoro, (1983), "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi: Studi Kasus di Kabupaten Subang Jawa Barat", Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.



- Kusnadi, N., (1990), "Penyediaan dan Penggunaan Kredit pada Usahatani Dampak "Model Farm" di Wilayah Hulu DAS Citanduy", Tesis Magister, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kusnadi, N., (2005), "Perilaku Ekonomi Rumah tangga Petani dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia", Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lains, A., (2006), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Jilid II, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Ledgerwood, J., (1999), *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*, The World Bank, Washington D.C.
- Llanto, G.M., (2007), "Overcoming Obstacles to Agricultural Microfinance: Looking at Broader Issues", *Asian Journal of Agriculture and Development*, 4(2), pp. 23-40.
- Manurung, (2005), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Morduch, J., (2000), "The Microfinance Schism", *World Development*, 28(4), pp. 617-629.
- Nuridin, A., (2007), *Membangun Bank UMKM : Concepts and Better Practices*, IRPA, Jakarta.
- Nurmanaf, A.R., (2007), "Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), hlm. 99-109.
- Nuswantara, B., (2009), "Pengaruh Kredit Mikro dan Kecil Terhadap Kinerja Usaha Kecil", *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia*, 19(2), hlm. 78-97.
- Nuswantara, B., (2012), "Peranan Kredit Mikro dan Kecil Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Perekonomian Wilayah di Provinsi Jawa Tengah", Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Olivares-Polanco, F.J., (2005), "Commercializing Microfinance and Deeping Outreach? Empirical Evidence from Latin America", *Journal of Microfinance*, 7(2), pp. 63-110.
- Otero, M., (1999), "Bringing Development Back, into Microfinance", *Journal of Microfinance*, 1(1), pp. 98-107.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld, (1991), *Econometric Models and Economic Forecast*, Third Edition. Mc Graw-Hill, Inc. New York.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld, (2001), *Microeconomics*, Fifth Edition. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Priyarsono, D.S., (2011), *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*, IPB Press, Bogor.
- Rachmina, D., (1994), "Analisis Permintaan Kredit pada Industri Kecil: Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur", Tesis Magister, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Radnor, Z.J. and D. Barnes, (2007), "Historical Analysis of Performance Measurement and Management in Operations Management", *International Journal of Productivity and Performance Management*, 56(5/6), pp. 384-396.
- Rahman, A., (1999), "Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays?", *World Development Journal*, 27(1), pp. 42-61.
- Ray, D., (1998), *Development Economics*, Princeton University Press, New Jersey.
- Raynor, J., (2003), "The Impact of Large Capital Infusion to Community Development Credit Unions", *Journal of Microfinance*, 5(1), pp. 71-97.

- Rhyne, E., (2009), *Microfinance for Bankers and Investors: Understanding the Opportunities and Challenges of the Market at the Bottom of the Pyramid*, McGraw-Hill, New York.
- Rivai, V. dan A.P.Veithzal, (2007), *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rose, P.S., (1999), *Commercial Bank Management, Fourth Edition*. Irwin McGraw-Hill, Boston.
- Schreiner, M., (2002), "Aspects of Outreach: A Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance", *Journal of International Development*, 14(5), pp. 591-603.
- Seibel, H.D., (2003), "History Matters in Microfinance", *International Journal of Microfinance and Business Development*, 14(2), pp. 10-12.
- Sinaga, B.M., (1989), "Econometric Model on the Indonesian Hardwood Products Industry: A Policy Simulation Analysis", Ph.D Dissertation, University of the Phillipines at Los Banos, Los Banos.
- Syukur, M., (2002), "Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumahtangga Miskin", Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Syukur, M., Sugiarto, Hendiarto, dan Wiryono, B., (2003), "Analisa Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian", Laporan Penelitian, Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Tambunan, M., (2004), "Usaha Kecil Menengah (UKM) dibawah Pemerintahan SBY-JK (2004-2009): Momentum Baru Menjadikan UKM Berdaya Saing dan Naik Kelas?", *Jurnal Infokop*, 25(10), hlm. 21-43.
- Tambunan, T., (2009), *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Triandaru, S dan T. Budisantoso, (2007), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- White, B., (1990), *Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan*, Sekindo Eka Jaya, Jakarta.
- Wibisono, D., (2006), *Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wijono, W., (2005), "Perberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus*, 9(4), pp. 86-100.
- Wirawan, (2009), *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yaron, J., McD.P. Benjamin Jr and G.L. Pipek, (1997), "Rural Finance: Issues, Design, and Best Practises", *Environmentally and Socially Sustainable Development Studies and Monographs Series 14*. The World Bank, Washington, D.C., pp.87
- Yunus, M. dan K. Weber, (2008), *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.